

## PUBLIKASI PERS

**JUDUL : KEMENRISTEK SERIUS KEMBANGKAN RS PENDIDIKAN**

**MEDIA : BERNAS**

**TANGGAL : 3 MARET 2016**

# Kemenristek Serious Kembangkan RS Pendidikan

JOGJA--Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (dikti) mulai menggenjot pengembangan rumah sakit (RS) pendidikan di Indonesia. Saat ini Kemenristek Dikti tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (kemenkes) untuk mengurus pengelolaan RS pendidikan di Indonesia.

"Kami melakukan koordinasi untuk mengembangkan kebijakan makro dan arah serta strategi pengelolaan rumah sakit pendidikan agar proses kedepan proses pembelajarannya lebih kondusif, baik untuk pendalaman, praktik, alih teknologi maupun

penanaman nilai-nilai prinsip dalam praktik kedokteran," ungkap Direktur Jenderal Sumberdaya Manusia Kemenristek Dikti, Prof dr Ali Gufron Mukti MSE usai peresmian RS Pendidikan UGM, Rabu (3/2).

Menurut Gufron, selama ini belum pernah ada petunjuk teknis (juknis) dan standar pengelolaan RS Pendidikan. Padahal saat ini ada 24 RS Pendidikan dari 74 Fakultas Kedokteran di Indonesia dibawah Kemenristek Dikti.

Karenanya standar-standar pengelolaan RS Pendidikan mulai disusun tahap demi tahap. Dengan demikian RS Pendidikan di Indonesia dapat

memberikan pelayanan yang berbasis pada bukti dan dilengkapi sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang profesional dan berkarakter.

"Diharapkan rumah sakit pendidikan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya," ungkapnya.

Guru besar Fakultas Kedokteran UGM itu menyebutkan, saat ini belum ada RS Pendidikan yang sempurna sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. Karenanya pembuatan standar dan juknis itu diharapkan akan

meningkatkan kualitas RS Pendidikan.

Tiap tahun Kemenristek Dikti mengalokasikan anggaran yang cukup besar. Tahun ini misalnya, anggaran sebesar 1,8 triliun digelontorkan untuk pendidikan tinggi. "Dana sebesar itu memang tidak hanya untuk rumah sakit pendidikan, namun dalam rangka pengembangan rumah sakit pendidikan, masing-masing mendapat sekitar 40-60 miliar" jelasnya.

Gufron berharap melalui berbagai kebijakan yang digalakkan maka Indonesia dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas di era Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) ini. Sehingga negara ini nantinya tidak hanya menjadi pasar dari tenaga kerja atau instansi asing.

Dia optimis SDM bidang kesehatan Indonesia akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Apalagi saat ini masih terjadi krisis tenaga kesehatan di dunia. "Dunia masih krisis tenaga kesehatan, tidak hanya Indonesia. Karenanya saat ini disusun grand strategy kesehatan dunia hingga 2020," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RS UGM Prof dr Ahif Faisal SpRad(K) DHSM mengungkapkan, RS UGM mengembangkan berbagai upaya

dalam perannya sebagai RS Pendidikan. RS tersebut menargetkan diri melengkapi semua kebutuhan RS akan kepemilikan dokter spesialis.

"Kami masih berusaha memenuhi kebutuhan dokter spesialis bedah syaraf," ujarnya.

Faizal menyebutkan, RS tersebut melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan RS UGM pada masyarakat DIY. Selain itu RS tersebut juga menjaga kualitas mereka karena saat ini telah terakreditasi A. "Kami terus berupaya komitmen kami untuk ikut menjaga kesehatan masyarakat Indonesia," imbuhnya. (pta)